

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis Mendukung Implementasi Program MBG

SAMARINDA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Ananda Emira Moeis menyatakan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintahan baru. Menurutnya, program tersebut merupakan inisiatif yang baik dan perlu mendapat kesempatan untuk disempurnakan sebelum diimplementasikan secara menyeluruh.

Berdasarkan informasi, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dikabarkan berkunjung ke Kaltim, Rabu (12/2) hari ini. Salah satu tujuan dari kunjungannya tersebut adalah untuk memantau proses pelaksanaan MBG di Kota Samarinda. Melalui program tersebut, DPRD Kaltim tentu saja menyambut dengan positif.

"Pemerintahan baru saat ini sedang dalam masa transisi. Ada program yang bagus dan harus dilaksanakan dengan baik. Kita beri kesempatan dan waktu, agar program ini bisa disempurnakan dan segera berjalan dengan baik dan benar," ujar Ananda.

la menambahkan, program MBG telah masuk dalam Asta Cita serta tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain itu, visi dan misi Presiden Prabowo juga mencakup program ini.

"Kita di provinsi harus memberikan dukungan penuh, agar program ini bisa berjalan. Sebagai mitra Gubernur, kami mendukung penuh langkah-langkah yang diambil, mengingat Gubernur merupakan perpanjangan tangan Presiden di lingkup pemerintah daerah," tambahnya. Terkait anggaran, Ananda mengungkapkan bahwa pembahasan lebih lanjut masih diperlukan.

Saat ini, pihaknya menunggu arahan resmi, termasuk kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang harus dilaksanakan secara serius dan penuh tanggung jawab.

"Soal anggaran per porsi masih dalam tahap pembahasan. Kita tunggu arahan lebih lanjut. Yang jelas, semua daerah termasuk Kaltim, pasti akan mendukung dan menjalankan program ini. Tinggal penyesuaian anggarannya saja," jelasnya.

Dengan dukungan dari DPRD Kaltim, diharapkan implementasi program MBG dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Kaltim. **(vc/ht/ip)**

Sumber Berita :

1. KoranKaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis Mendukung Implementasi Program MBG, 12/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kepala daerah mempunyai tugas antara lain:
 - a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 - d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
2. Berdasarkan Diktum Keempat angka 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.

